

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Yth.
1. Menteri Pekerjaan Umum
 2. Menteri Perhubungan
 3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 4. Menteri Kelautan dan Perikanan
 5. Menteri Pertanian
 6. Menteri Perdagangan
 7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 8. Menteri Kesehatan
 9. Menteri Negara Koperasi dan UKM
 10. Menteri Negara Perumahan Rakyat
 11. Gubernur/Bupati/Walikota Penerima Bantuan Teknis dan Pendanaan Kegiatan Stimulus Fiskal
Jakarta

SURAT EDARAN
Nomor: SE-82 /MK.02/2010

TENTANG

**PEMOTONGAN/PENGURANGAN PAGU BELANJA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA DAN PAGU ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010 YANG TIDAK SEPENUHNYA MELAKSANAKAN
KEGIATAN STIMULUS FISKAL TAHUN ANGGARAN 2009**

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Stimulus Fiskal 2009 maka dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN TA 2010 yang dijabarkan dalam PMK 220/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pemotongan/ Pengurangan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Pagu Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2010 yang tidak sepenuhnya melaksanakan kegiatan stimulus fiskal Tahun Anggaran 2009, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 14 UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010 ditentukan bahwa terhadap kementerian negara/lembaga termasuk provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan/dekonsentrasi yang tidak sepenuhnya melaksanakan belanja stimulus fiskal Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah ditetapkan, maka pagu belanjanya dalam tahun anggaran 2010 dipotong/dikurangi.
Pemotongan/pengurangan pagu tersebut berlaku juga bagi provinsi dan kabupaten/kota yang menerima bantuan teknis dan pendanaan stimulus fiskal dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan/tugas pemerintah daerah, namun tidak sepenuhnya melaksanakan belanja stimulus fiskal Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah ditetapkan.
2. Dalam PMK 220/PMK.02/2009 tersebut telah diatur mengenai (a) ketentuan mengenai pihak yang dikenai pemotongan/pengurangan, (b) ketentuan mengenai besaran pemotongan/pengurangan, (c) mekanisme/prosedur pemotongan/pengurangan, (d) kriteria alasan-alasan tidak terserapnya anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan (e) pagu anggaran Stimulus Fiskal 2009 menurut kementerian negara/lembaga (K/L) dan Daerah.
3. Kementerian Keuangan telah menyampaikan surat No.S-25/MK.02/2010 tanggal 22 Januari 2010 kepada seluruh K/L pelaksana kegiatan stimulus fiskal berupa permintaan data laporan realisasi kegiatan dan anggaran stimulus fiskal (LRKA-SF), berikut alasan jika terdapat anggaran yang tidak terserap.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Dari hasil kegiatan penghimpunan dan rekonsiliasi data LRKA-SF tersebut, dalam **Lampiran I** Surat Edaran ini disajikan data pagu dan realisasi anggaran stimulus fiskal 2009, yang dikelompokkan sebagai berikut:
 - a) Anggaran dan realisasi stimulus fiskal yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga untuk pelaksanaan urusan Pemerintah Pusat, dilaksanakan sendiri oleh instansi vertikal K/L;
 - b) Anggaran dan realisasi stimulus fiskal yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga untuk pelaksanaan urusan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan dengan mekanisme Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
 - c) Anggaran dan realisasi stimulus fiskal yang dialokasikan kepada daerah propinsi/kabupaten/kota melalui Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bantuan teknis dan pendanaan dalam rangka penguatan pelaksanaan urusan pemerintah daerah.
5. Berdasarkan data realisasi tersebut, telah dilakukan penilaian dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK No. 220/PMK.02/2009 serta klarifikasi kepada masing-masing K/L, maka telah ditetapkan pemotongan/pengurangan pagu belanja K/L dan pagu alokasi transfer ke daerah sebagaimana disajikan dalam **Lampiran II** Surat Edaran ini.
6. K/L yang dikenakan pemotongan/pengurangan pagu agar menyampaikan usulan penyesuaian/revisi SAPSK/DIPA tahun anggaran 2010 kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 30 Maret 2010, dengan mengikuti ketentuan revisi SAPSK/DIPA yang berlaku.
7. Pemotongan/pengurangan pagu alokasi dana transfer ke daerah TA 2010 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dalam tahun 2009 menerima bantuan teknis dan pendanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum.
8. Pemotongan/pengurangan pagu di atas akan dilaporkan dalam APBNP 2010 dan atau LKPP 2010.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

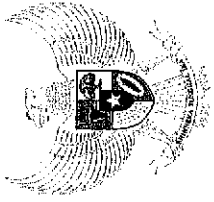
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2010
Menteri Keuangan,



[Handwritten signature]
Mulyani Indrawati

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
10. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
11. Direktur Jenderal Anggaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

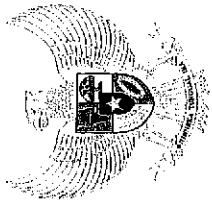
RINCIAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN STIMULUS FISKAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2009

(dalam ribu rupiah)

KODE	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	ALOKASI ANGGARAN										LAPORAN REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN STIMULUS FISKAL (LRKA-SF) TA 2009
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		INSTANSI PUSAT/ VERTIKAL	DEKONSENTRASI	TUGAS PEMBANTUAN	BANTUAN TEKNIS PENDANAAN TUGAS PEMDA	JUMLAH	PEMBLOKIRAN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN SETELAH BLOKIR				
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	225.000.000	0	35.000.000	0	260.000.000	11.353.339	248.646.661				240.077.907
020	KEMENTERIAN ESDM	500.000.000	0	0	0	500.000.000	3.788.666	496.211.334				491.713.160
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.198.800.000	0	0	0	2.198.800.000	35.651.273	2.163.148.727				2.099.859.095
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	150.000.000	0	0	0	150.000.000	70.669	149.929.331				149.782.527
026	KEMENTERIAN NAKERTRANS	70.084.640	101.062.595	128.852.765	0	300.000.000	0	300.000.000				256.508.366
032	KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN	1.136.200	0	98.863.800	0	100.000.000	0	100.000.000				96.825.119
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	3.506.021.000	0	110.979.000	2.984.200.000	6.601.200.000	86.386.334	6.514.813.666				6.449.391.996
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	4.500.000	0	95.500.000	0	100.000.000	0	100.000.000				93.644.356
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	400.000.000	0	335.000.000	0	335.000.000	173.000	334.827.000				324.280.428
091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0	400.000.000				398.040.383
	TOTAL	7.055.541.840	101.062.595	804.195.565	2.984.200.000	10.945.000.000	137.423.281	10.807.576.719				10.600.123.336

a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Anggaran,

Anny Ratnawati
NIP 196202241987032001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PEMOTONGAN/PENGURANGAN PAGU BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PAGU ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 YANG
TIDAK SEPENUHNYA MELAKSANAKAN KEGIATAN
STIMULUS FISKAL TAHUN ANGGARAN 2009

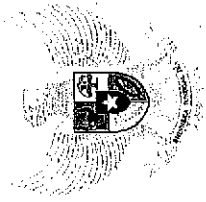
RINCIAN PAGU, REALISASI ANGGARAN STIMULUS FISKAL TAHUN ANGGARAN 2009
DAN PEMOTONGAN/PENGURANGAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN 2010

(dalam ribu rupiah)

KODE	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	ALOKASI ANGGARAN	PEMBLOKIRAN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN SETELAH BLOKIR	LAPORAN REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN STIMULUS FISKAL (LRKA-SF) TA 2009	SISA YANG TIDAK TEREALISASI			DIPOTONG/ DIKURANGI
						6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	260.000.000	11.353.339	248.646.661	240.077.907	8.568.754	0	0	
020	KEMENTERIAN ESDM	500.000.000	3.788.666	496.211.334	491.713.160	4.498.174	0	0	
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.198.800.000	35.651.273	2.163.148.727	2.099.859.095	63.289.632	11.150.862	0	
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	150.000.000	70.669	149.929.331	149.782.527	146.805	0	0	
026	KEMENTERIAN NAKERTRANS	300.000.000	0	300.000.000	256.508.366	43.491.634	916.100	0	
032	KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN	100.000.000	0	100.000.000	96.825.119	3.174.881	0	0	
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	6.607.200.000	86.386.334	6.514.913.666	6.449.391.996	65.421.670	0	0	
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	100.000.000	0	100.000.000	93.644.356	6.355.644	1.000.000	0	
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	335.000.000	173.000	334.827.000	324.280.428	10.546.572	0	0	
091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	400.000.000	0	400.000.000	398.040.383	1.959.617	0	0	
	TOTAL	10.945.000.000	137.423.281	10.807.576.719	10.600.123.336	207.453.383	13.066.962	0	

a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Anggaran,

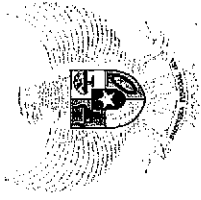
Anny Ratnawati
NIP. 196202241987032001



KEPADA YAYASAN
 MEISTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 - 2 -

**II.A.1. RINCIAN ALOKASI SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL
 YANG TIDAK SEPENUHNYA MELAKSANAKAN KEGIATAN STIMULUS FISKAL T.A. 2009
 DENGAN ALASAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN**

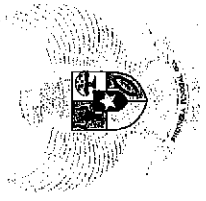
KODE BA	KODE UNIT	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN SATUAN KERJA	INSTANSI PUSAT/VERTIKAL	PEMBLOKIRAN ANGGARAN	PAGU SETELAH BLOKIR	LRKA-SF TA 2009	(dalam ribu rupiah)	
							SISA TIDAK TEREALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		KEMENTERIAN PERTANIAN	22.000.000	5.299.338	23.309.661	28.547.208	6.237.547	
1	01	PUSAT DATA DAN INFORMASI PERTANIAN	20.000.000	0	20.000.000	18.114.000	1.886.000	
2	01	BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	30.000.000	0	30.000.000	29.932.000	68.000	
3	04	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	40.000.000	140.000	39.860.000	37.764.000	2.096.000	
4	06	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN	2.000.000	0	2.000.000	1.819.600	180.400	
5	06	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	3.000.000	180.000	2.820.000	2.795.499	24.501	
6	06	BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG	2.000.000	0	2.000.000	1.968.012	31.988	
7	06	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI POTONG PADANG MANGATAS	8.000.000	0	8.000.000	7.912.098	87.902	
8	07	BALAI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	57.000.000	10.384.674	46.615.326	43.840.000	2.775.326	
9	08	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR	12.000.000	3.000	11.997.000	11.289.000	708.000	
10	12	SEKRETARIAT BADAN KARANTINA PERTANIAN	38.000.000	582.665	37.417.335	37.309.000	108.335	
11	12	BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN	13.000.000	0	13.000.000	12.804.000	196.000	
020		KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	500.000.000	3.788.666	496.211.334	497.713.160	1.491.826	
1	05	DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	75.000.000	3.788.666	71.211.334	66.713.160	4.498.174	
2	05	INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN JAWA BALI DAN NUSA TENGGARA	230.000.000	0	230.000.000	230.000.000	0	
3	05	INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA	195.000.000	0	195.000.000	195.000.000	0	
022		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.116.544.000	35.642.105	2.152.186.105	2.028.370.127	123.815.973	
1	03	PENGEMBANGAN TRANSPORTASI SDP	21.240.405	0	21.240.405	21.231.027	9.378	
2	03	PENGEMBANGAN LLASDP JAWA TIMUR	14.000.000	0	14.000.000	13.800.175	199.825	
3	03	PENGEMBANGAN LLASDP BALI	20.109.220	0	20.109.220	18.874.925	1.234.295	
4	03	PENGEMBANGAN LLASDP KALIMANTAN TIMUR	4.958.375	201.176	4.757.199	4.697.632	59.567	
5	03	PENGEMBANGAN LLASDP PAPUA BARAT	1.500.000	0	1.500.000	1.486.336	13.664	
6	04	KANTOR PELABUHAN P A R T I G I	11.000.000	0	11.000.000	10.834.754	165.246	
7	04	ADMINISTRATOR PELABUHAN LUJUNG PANDANG	9.000.000	0	9.000.000	8.252.253	747.748	
8	04	ADMINISTRATOR PELABUHAN TERNATE	46.500.000	1.517.000	44.983.000	44.699.871	283.129	
9	04	ADMINISTRATOR PELABUHAN ENDE	10.000.000	0	10.000.000	9.841.640	158.360	
10	04	ADMINISTRATOR PELABUHAN KUALA PEMBUANG	10.000.000	6.700	9.993.300	9.418.525	574.775	
11	04	KANTOR PELABUHAN ATAPURU	8.000.000	0	8.000.000	7.827.880	172.120	
12	04	ADMINISTRATOR PELABUHAN TG-PINANG	15.000.000	0	15.000.000	14.740.480	259.520	
13	04	KANTOR PELABUHAN SELAYAR	13.000.000	531	12.999.469	12.449.844	549.625	
14	04	KANTOR PELABUHAN POLEWALI	5.000.000	2.497	4.997.503	4.991.175	6.328	
15	04	KANTOR PELABUHAN BAWU	15.000.000	0	15.000.000	14.894.344	105.656	
16	04	KANTOR PELABUHAN KOLONEDALE	20.000.000	0	20.000.000	19.878.725	121.275	
17	04	KANTOR PELABUHAN SANANA	26.000.000	0	26.000.000	25.948.225	51.775	
18	04	KANTOR PELABUHAN BIRINGKASI	10.000.000	0	10.000.000	9.781.761	218.240	
19	04	PENINGKATAN FUNGSI PELABUHAN DAN PENERBUKAN PUSAT	25.000.000	25.000.000	0	0	0	
20	04	PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN MANOKWARI	50.500.000	0	50.500.000	49.736.894	763.106	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

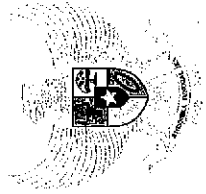
KODE BA	KODE UNIT	KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA DAN SATUAN KERJA	INSTANSI PUSAT/VERTIKAL	PEMBLOKIRAN ANGGARAN	PAGU SETELAH BLOKIR	LRKA-SF TA 2009	SISA TIDAK TEREALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
21	04	448101 PEMBANGUNAN FASPEL LAUT LABUHAN AMUK / BALI	16.500.000	286	16.499.714	12.040.909	4.458.805
22	04	497964 PEMBANGUNAN FASPEL LAUT PULAU TERLUAR KEPULAUAN RIAU	20.000.000	0	20.000.000	10.139.246	9.860.754
23	04	497989 PEMBANGUNAN FASPEL LAUT BATANG DAN REMBANG JATENG	10.000.000	7.000	9.993.000	9.068.964	934.036
24	04	497995 PEMBANGUNAN FASPEL PANARUKAN JATIM	40.000.000	1.634	39.998.366	39.997.398	968
25	04	498950 PEMBANGUNAN FASPEL LAUT KUALA SEMBOJA DAN MALOY/SANGKULIRANG KALTIM	38.000.000	17.782	37.982.218	36.394.850	1.587.368
26	04	498969 PEMBANGUNAN FASPEL LAUT PANTOLAN SULTENG	5.000.000	4.000	4.996.000	4.884.275	111.725
27	04	498975 PEMBANGUNAN FASPEL LAUT KONAWE SULTRA	5.000.000	5.000.000	0	0	0
28	04	499010 PEMBANGUNAN FASPEL LAUT PASANG KAYU DAN BUDONG-BUDONG SULBAR	15.000.000	0	15.000.000	14.494.868	505.142
29	04	499041 PEMBANGUNAN FASPEL LAUT AMBALAU MALUKU	18.000.000	12.000	17.988.000	17.919.725	68.275
30	04	499315 PEMBANGUNAN FASPEL LAUT TANJUNG BATU - BABEL	25.000.000	0	25.000.000	24.749.510	250.490
31	04	499321 PEMBANGUNAN FASPEL BUMBUHAN POHUWATO - GORONTALO	28.000.000	0	28.000.000	27.873.863	126.137
32	04	499412 PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN PENAJAM PASIR DAN KARINGAU/BALIKPAPAN	5.000.000	4.000	4.996.000	4.799.203	196.797
33	04	499428 PEMBANGUNAN DERWAGA PENUMPANG DUMAI	5.000.000	0	5.000.000	4.983.577	16.423
34	04	521349 KANTOR PELABUHAN BRANTA	25.000.000	0	25.000.000	24.982.688	17.312
35	04	521395 KANTOR PELABUHAN BRONDONG	20.000.000	18.018	19.981.982	18.088.069	1.893.923
36	04	521438 KANTOR PELABUHAN TANJUNG TIRAM	4.000.000	0	4.000.000	3.934.192	65.808
37	04	521768 KANTOR PELABUHAN TILAMUTA	10.000.000	0	10.000.000	9.924.284	75.716
38	04	521815 KANTOR PELABUHAN JAMPEA	20.000.000	0	20.000.000	19.924.386	75.614
39	04	521840 KANTOR PELABUHAN SINJAI	5.000.000	0	5.000.000	4.995.945	4.055
40	04	521899 KANTOR PELABUHAN GEBE	2.300.000	1.810	2.298.190	2.282.825	15.365
41	04	521967 KANTOR PELABUHAN POMAKO IPOMAKO II	12.000.000	0	12.000.000	11.886.823	113.177
42	04	559196 KANTOR PELABUHAN TANJUNG BERINGIN	7.200.000	0	7.200.000	7.101.746	98.254
43	04	559360 KANTOR PELABUHAN JANEPONTO	2.500.000	0	2.500.000	2.486.930	13.070
44	04	559381 KANTOR PELABUHAN SIWA	5.000.000	4.000	4.996.000	4.990.515	5.485
45	04	559442 KANTOR PELABUHAN LAIWU	24.400.000	108.669	24.290.331	24.282.125	28.206
46	04	559470 KANTOR PELABUHAN BULI	10.000.000	7.000	9.993.000	9.980.700	12.300
47	04	901475 PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN CERCOCK PAIMAN - PESISIR SELATAN (SUMBAR)	10.000.000	7.000	9.993.000	4.480.052	5.512.948
48	05	288372 BANDAR UDARA TARAKAN DI TARAKAN	90.023.460	29.000	89.994.460	89.994.453	7
49	05	288467 BANDAR UDARA BABULLAH DI TERNATE	67.641.700	0	67.641.700	67.516.820	24.880
50	05	288511 BANDAR UDARA MAU HAU DI WAINGAPU/SUMBA TIMUR	5.400.000	0	5.400.000	5.364.295	35.705
51	05	288560 BANDAR UDARA SENTANI DI JAYAPURA	91.263.501	0	91.263.501	91.222.742	40.759
52	05	288588 BANDAR UDARA DOMINE EDUARD OSOK - SORONG	21.219.777	1.000	21.218.777	21.177.181	41.596
53	05	288592 BANDAR UDARA MOPAH DI MERAUKE	107.614.034	0	107.614.034	107.378.598	235.436
54	05	288621 BANDAR UDARA FATMAWATI	5.777.602	0	5.777.602	5.707.187	70.415
55	05	413859 BANDAR UDARA KASIGUNCU DI POSO	18.288.200	0	18.288.200	16.020.368	2.267.832
56	05	413953 BANDAR UDARA BERINGIN DI MUARA TEWEH	49.000.000	20.000	48.980.000	48.637.000	343.000
57	05	413990 BANDAR UDARA LALOS DI TOLI TOLI	21.987.000	0	21.987.000	21.824.939	162.061
58	05	414066 BANDAR UDARA SARMI DI JAYAPURA	6.014.800	7.000	6.007.800	5.976.790	31.010
59	05	414117 BANDAR UDARA MULIA DI NABIRE	33.000.000	0	33.000.000	32.635.923	364.077
60	05	414185 BANDAR UDARA PANGSUMA DI PUTUSIBAU	3.800.002	0	3.800.002	3.595.613	4.389
61	05	414251 BANDAR UDARA KOMODO DI LABUAN BAJU	20.000.001	0	20.000.001	19.899.313	100.688



MENTERI KELOMPOK INDUSTRI
REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribu rupiah)

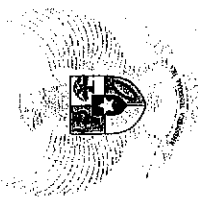
KODE BA	KODE UNIT	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN SATUAN KERJA	INSTANSI PUSAT/VERTIKAL	PEMBLOKIRAN ANGGARAN	PAGU SETELAH BLOKIR	LRKA-SFTA 2009	SISA TIDAK TEREALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
62	05	449463 BANDAR UDARA MEDAN BARU	100.000.000	0	100.000.000	99.987.718	12.282
63	05	449472 BANDAR UDARA PAGAR ALAM	5.000.000	0	5.000.000	3.930.093	1.069.907
64	05	449508 BANDAR UDARA AROEPALA - SELAYAR	10.000.000	0	10.000.000	9.996.500	3.500
65	05	465569 BANDAR UDARA ADI SUCIPTO - YOGYAKARTA	47.062.800	41.360	47.021.240	42.397.823	4.623.417
66	05	465590 DIREKTORAT BANDAR UDARA	15.000.000	42.000	14.958.000	14.474.836	483.164
67	05	465672 ADBANDARA HASANUDDIN - MAKASAR	14.937.400	0	14.937.400	14.749.023	188.377
68	05	466250 BANDAR UDARA POGUGOL BUOL	2.940.000	0	2.940.000	2.929.631	10.369
69	05	466287 BANDAR UDARA SILANGIT - SIBORONG BORONG	20.000.000	0	20.000.000	19.256.983	743.017
70	05	466297 BANDAR UDARA SOA DI BAJAWA	2.940.000	0	2.940.000	2.935.357	4.643
71	05	522011 BANDAR UDARA HALIWIEN DI ATAMBUA	4.950.000	9.000	4.941.000	4.109.569	831.431
72	05	522028 BANDAR UDARA LEKUNIK DI ROTE	20.932.022	0	20.932.022	19.364.104	1.567.918
73	05	539011 BANDAR UDARA ANDIJEMA DI MASAMBA	10.080.000	0	10.080.000	10.063.423	16.577
74	05	547924 BANDAR UDARA ABEK GODANG	10.896.901	0	10.896.901	10.431.867	465.234
75	05	568801 BANDAR UDARA CAKRABUWANA DI CIREBON	8.723.001	2.883.887	5.839.114	5.347.687	491.427
76	05	568822 BANDAR UDARA WUNUPITO DI LEWOLEBA	9.999.999	35.100	9.964.899	9.904.162	60.737
77	05	568861 BANDAR UDARA WUNUNUKAN DI NUNUKAN	25.000.000	0	25.000.000	24.540.416	459.584
78	05	662862 BANDAR UDARA SUGIMANURU MUNA DI SULAWESI TENGGARA	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
79	08	439511 PEMBANGUNAN JALUR GANDA CIREBON - KROYA	166.900.000	0	166.900.000	166.038.733	861.267
80	08	445589 PEMBANGUNAN JALUR GANDA TANAH ABANG - SERPONG - MAJAJ	39.700.000	0	39.700.000	39.264.241	435.759
81	08	467303 PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN SUMATERA UTARA	23.538.000	0	23.538.000	23.478.056	59.944
82	08	467359 PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN JAWA BARAT	35.406.000	0	35.406.000	35.303.481	102.539
83	08	467365 PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS UTARA JAWA	20.000.000	0	20.000.000	19.084.539	915.461
84	08	467416 PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA	35.300.000	0	35.300.000	35.129.410	170.590
85	08	467431 PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN JAWA TIMUR	98.601.000	0	98.601.000	97.172.117	1.428.883
86	08	467478 PEMBANGUNAN SARANA PERKERETAAPIAN	114.189.000	651.655	113.547.345	112.485.240	1.062.105
024 KEMENTERIAN KESEHATAN			149.929.331	70.669	149.929.331	149.929.331	148.805
1	04	415423 RUMAH SAKIT UMUM DR. CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA	150.000.000	70.669	149.929.331	149.782.527	148.805
026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			70.984.500	0	70.984.500	59.528.778	10.555.822
1	04	451151 DIREKTORAT PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI DITJEN SINAPENTA DEPNAKERTRANS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000
2	13	065106 BLK BANDA ACEH	2.237.618	0	2.237.618	1.851.245	386.373
3	13	426531 BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI SERANG	3.422.490	0	3.422.490	3.300.499	121.991
4	13	451026 SETDIJEN BINALATAS DEPNAKERTRANS	1.776.443	0	1.776.443	1.395.411	381.032
5	13	451032 DIREKTORAT STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PROGRAM PELATIHAN DITJEN BINALATAS DEPNAKERTRANS	4.000.000	0	4.000.000	2.994.209	1.005.791
6	13	451041 DIREKTORAT BINA INSTRUKTUR DAN TENAGA KEPELATIHAN DITJEN BINALATAS DEPNAKERTRANS	4.500.380	0	4.500.380	4.089.577	410.803
7	13	451057 DIREKTORAT BINA LEMBAGA DAN SARANA PELATIHAN KERJA DITJEN BINALATAS DEPNAKERTRANS	11.268.611	0	11.268.611	10.445.219	823.392
8	13	451094 BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI MEDAN	2.310.550	0	2.310.550	2.198.180	112.370
9	13	451108 BLKI SAMARINDA	3.312.425	0	3.312.425	2.989.389	323.036
10	13	452542 BALAI BESAR PEMBANGUNAN LATIHAN KERJA DALAM NEGERI BANDUNG	2.999.925	0	2.999.925	2.660.832	339.093



MENTERI KEADILAN
REPUBLIC INDONESIA

(dalam ribu rupiah)

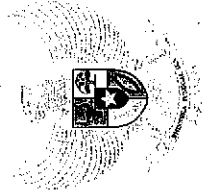
KODE BA	KODE UNIT	KEMENTERIAN-NEGARA/LEMBAGA DAN SATUAN KERJA	INSTANSI PUSAT/VERTIKAL	PEMBLOKIRAN ANGGARAN	PAGU SETELAH BLOKIR	LRKA-SF TA 2009	SISA TIDAK TEREALISASI
1	2						
11	13	452558 BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA LUAR NEGERI BEKASI	4.216.310	0	4.216.310	3.655.351	560.959
12	13	452564 BB PENINGKATAN PRODUKTIVITAS	707.350	0	707.350	399.998	307.352
13	13	452570 BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KETRANSMIGRASI	374.889	0	374.889	369.842	5.248
14	13	452589 BLKI BORONG	5.849.400	0	5.849.400	5.794.741	54.660
15	13	452595 BLKI TERNATE	3.393.125	0	3.393.125	3.282.899	110.226
16	13	452609 BLKI SEMARANG	3.784.300	0	3.784.300	3.408.605	375.695
17	13	452652 BLKI UJUNG PANDANG	4.694.925	0	4.694.925	4.350.214	344.711
18	13	498831 BLKI MANOKWARI	1.383.380	0	1.383.380	1.377.495	5.885
19	13	522825 BALAI BESAR LATIHAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA	479.500	0	479.500	315.488	164.014
20	13	522871 BALAI LATIHAN TRANSMIGRASI PROP. RIAU DI PEKANBARU	359.051	0	359.051	328.641	30.410
21	13	522721 BALAI LATIHAN TRANSMIGRASI PROP. KALIMANTAN SELATAN DI BANJARWASIN	1.523.116	0	1.523.116	1.181.315	341.801
22	13	522760 BALAI LATIHAN TRANSMIGRASI PROP. SULAWESI SELATAN DI UJUNG PANDANG	2.942.892	0	2.942.892	2.779.172	163.520
23	13	522798 BALAI LATIHAN TRANSMIGRASI PROP. BALI DI DENPASAR	2.048.160	0	2.048.160	360.660	1.687.500
032		KEMENTERIAN KEKULTURAN DAN PERKAWAN	1.362.200	0	1.362.200	1.135.880	320
1	07	465173 DIREKTORAT PESISIR DAN LAUTAN	1.136.200	0	1.136.200	1.135.880	320
033		KEMENTERIAN PERKERASAN JUMBUH	3.506.024.000	36.386.324	3.469.637.676	3.420.297.392	662.776
1	01	898001 BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	5.000.000	0	5.000.000	4.913.186	86.814
2	03	465708 PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN SANGAT BERKEMBANG	15.000.000	0	15.000.000	13.567.820	1.432.180
3	04	447925 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX (MALUKU & MALUKU UTARA) DI AMBON	250.000	0	250.000	210.000	40.000
4	04	447931 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL II (SUMBAR, BENGKULU DAN LAMPUNG) DI PADANG	200.000	0	200.000	84.421	115.579
5	04	447940 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL III (JAMBI, SUMSEL, DAN BABEL) DI PALEMBANG	150.000	0	150.000	150.000	0
6	04	447956 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IV (BANTEN, DKI, DAN JABAR) DI DKI	150.000	0	150.000	140.968	9.032
7	04	447962 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL V (JATENG, DIY, JATIM) DI SURABAYA	200.000	0	200.000	183.495	16.505
8	04	447971 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII (KALBAR, KALTENG, KALSEL DAN KALTIM) DI BANJARWASIN	200.000	0	200.000	64.156	135.844
9	04	447987 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI (SULSEL, SULBAR, SULTRA, SULTENG, SULUT & GORONTALO) DI MAKASAR	350.000	0	350.000	252.928	97.072
10	04	447993 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIII (BALI, NTB, NTT) DI DENPASAR	150.000	0	150.000	150.000	0
11	04	448007 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX (MALUKU & MALUKU UTARA) DI AMBON	200.000	0	200.000	198.645	1.355
12	04	448013 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL X (PAPUA DAN IRIJUBAR) DI JAYAPURA	250.000	0	250.000	204.959	45.041
13	04	471126 PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI JAWA BARAT	137.049.151	0	137.049.151	137.048.636	515
14	04	471132 PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN JAWA TIMUR	25.345.255	0	25.345.255	25.345.255	0
15	04	471133 PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI KALTIM	29.500.000	0	29.500.000	28.615.000	885.000
16	04	471172 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN JAWA BARAT	20.716.226	0	20.716.226	20.716.226	0
17	04	471162 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN JABAR	2.234.623	0	2.234.623	2.071.511	163.112
18	04	471735 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN JATIM	1.217.370	0	1.217.370	1.211.366	6.004
19	04	471797 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN JATIM	34.197.959	0	34.197.959	34.197.959	0
20	04	471860 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI SUMATERA UTARA	40.000.000	0	40.000.000	38.800.000	1.200.000
21	04	471951 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	36.900.000	0	36.900.000	36.900.000	0
22	04	472049 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROV. RIAU	28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	0



KEANTARAAN
REPUBLIC INDONESIA

(dalam ribu rupiah)

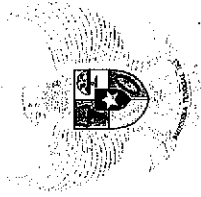
KODE BA	KODE UNIT	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN SATUAN KERJA	INSTANSI PUSAT/VERTIKAL	PEMELOKIRAN ANGGARAN	PAGU SETELAH BLOKIR	LRKA-SF TA 2009	SISA TIDAK TEREALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
23	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROV. JAMBI	14.600.000	0	14.600.000	14.600.000	0
24	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	27.900.000	0	27.900.000	27.900.000	0
25	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI LAMPUNG	36.450.000	0	36.450.000	36.450.000	0
26	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN KALIMANTAN BARAT	46.006.865	0	46.006.865	46.006.865	0
27	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI KALTENG I	90.327.500	0	90.327.500	88.071.572	2.255.928
28	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI KALSEL	233.243.426	0	233.243.426	230.607.700	2.635.726
29	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI KALTENG II	216.814.587	0	216.814.587	214.450.034	2.364.553
30	04	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN KALSEL	9.000.000	0	9.000.000	8.845.204	154.796
31	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI KALTIM	13.762.919	0	13.762.919	13.762.919	0
32	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN SULAWESI UTARA	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	0
33	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN SULAWESI TENGAH	24.900.000	0	24.900.000	24.900.000	0
34	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN SULAWESI SELATAN	33.029.000	0	33.029.000	33.029.000	0
35	04	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN SULAWESI SELATAN	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	0
36	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN SULAWESI TENGGARA	19.500.000	0	19.500.000	18.915.000	585.000
37	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN NUSA TENGGARA BARAT	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0
38	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN JATENG	9.386.744	0	9.386.744	9.386.744	0
39	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN JAWA TENGAH	73.992.143	0	73.992.143	73.344.507	647.636
40	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN METROPOLITAN JAKARTA	22.000.000	0	22.000.000	21.999.194	806
41	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PAPUA	20.193.937	0	20.193.937	20.193.937	0
42	04	DIREKTORAT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH BARAT	1.000.000	0	1.000.000	886.650	113.350
43	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI SULAWESI BARAT	10.000.000	0	10.000.000	9.700.000	300.000
44	04	PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI KALTENG	6.582.913	0	6.582.913	6.582.913	0
45	04	PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI KALSEL	15.256.574	0	15.256.574	15.256.574	0
46	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROV. NAD	8.758.429	0	8.758.429	8.758.429	0
47	04	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	950.000	0	950.000	950.000	0
48	04	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN JAMBI	400.000	0	400.000	400.000	0
49	04	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI BENGKULU	242.149	0	242.149	242.149	0
50	04	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI LAMPUNG	250.000	0	250.000	250.000	0
51	04	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN KALBAR	621.113	0	621.113	621.113	0
52	04	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN KALTEG	300.000	0	300.000	297.603	2.397
53	04	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI KALTIM	3.500.000	0	3.500.000	3.396.038	103.962
54	04	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN SULAWESI TENGAH	500.000	0	500.000	473.682	26.318
55	04	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN SULAWESI TENGGARA	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	0
56	04	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN SULAWESI TENGGARA	500.000	0	500.000	478.764	21.236
57	04	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN PAPUA BARAT	1.020.000	0	1.020.000	1.008.625	11.375
58	04	PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI BANTEN	34.990.000	0	34.990.000	34.990.000	0
59	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN BANGKA BLITUNG	50.871.000	0	50.871.000	49.889.055	981.945
60	04	PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN BANGKA BLITUNG	5.325.000	0	5.325.000	5.149.062	175.938
61	04	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI BANGKA BLITUNG	1.325.000	0	1.325.000	1.278.522	46.478
62	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI BANTEN	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
63	04	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI BANTEN	152.361	0	152.361	152.361	0



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribu rupiah)

KODE BA	KODE UNIT	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN SATUAN KERJA	INSTANSI PUSAT/VERTIKAL	PEMBLOKIRAN ANGGARAN	PAGU SETELAH BLOKIR	LRKA-SF TA 2009	SISA TIDAK TEREALISASI	
							7	8
64	04	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN GORONTALO	330.000	0	330.000	330.000	0	0
65	04	PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN GORONTALO	4.970.000	0	4.970.000	4.820.900	149.100	0
66	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN GORONTALO	2.358.885	0	2.358.885	2.358.885	0	0
67	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PAPUA BARAT	20.112.239	0	20.112.239	20.022.630	89.609	0
68	04	PRESERVASI DAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN METROPOLITAN SEMARANG	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	0	0
69	04	PRESERVASI DAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN METROPOLITAN SURABAYA	10.264.416	0	10.264.416	10.264.416	0	0
70	04	PRESERVASI DAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN METROPOLITAN MEDAN	22.800.000	0	22.800.000	22.382.367	417.633	0
71	04	PRESERVASI DAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN METROPOLITAN MAKASAR	3.871.000	0	3.871.000	3.785.739	85.261	0
72	04	PRESERVASI DAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERBATASAN KALTIM	25.037.081	0	25.037.081	25.037.081	0	0
73	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERBATASAN KALBAR	14.543.135	1.210.000	13.333.135	14.227.560	-894.415	0
74	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERBATASAN KALBAR	1.000.000	0	1.000.000	970.300	29.700	0
75	04	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN METRO SEMARANG	2.000.000	0	2.000.000	1.422.461	577.539	0
76	04	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	1.000.000	0	1.000.000	309.693	690.307	0
77	04	DIREKTORAT BINA PROGRAM	3.500.000	0	3.500.000	3.295.977	204.023	0
78	04	DIREKTORAT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH TIMUR	1.000.000	0	1.000.000	615.400	384.600	0
79	04	PEMBANGUNAN JALAN MALALA-TOLITOLUHU	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0
80	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN JAWAWIJAYA	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
81	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN MERAUKE	9.860.000	0	9.860.000	9.860.000	0	0
82	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN NABIRE	11.152.000	0	11.152.000	11.152.000	0	0
83	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN SORONG	49.354.000	0	49.354.000	49.354.000	0	0
84	04	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN FAKFAK	14.556.000	0	14.556.000	14.556.000	0	0
85	04	PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO - KERTOSOONO	15.000.000	0	15.000.000	14.518.724	481.276	0
86	05	DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM	2.000.000	4.161	1.995.839	1.182.490	813.349	0
87	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM SULAWESI BARAT	13.000.000	0	13.000.000	12.246.701	753.299	0
88	05	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BANGKA BELITUNG	65.000.000	0	65.000.000	58.542.624	6.457.376	0
89	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM SUMATERA UTARA	5.000.000	0	5.000.000	4.518.902	480.098	0
90	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM SUMATERA BARAT	7.064.646	0	7.064.646	6.560.630	504.016	0
91	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM RIAU	6.876.142	0	6.876.142	6.368.844	507.298	0
92	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM SUMATERA SELATAN	3.248.885	0	3.248.885	3.062.122	186.763	0
93	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM BANGKA BELITUNG	3.598.585	0	3.598.585	3.324.221	274.364	0
94	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM JAWA BARAT	24.104.419	0	24.104.419	23.088.416	1.016.003	0
95	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM JAWA TENGAH	18.512.196	0	18.512.196	17.142.274	1.369.922	0
96	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM D.I. YOGYAKARTA	5.000.000	0	5.000.000	4.836.307	163.693	0
97	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM JAWA TIMUR	10.783.151	0	10.783.151	10.585.130	178.021	0
98	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM KALIMANTAN TENGAH	10.000.000	0	10.000.000	9.901.262	98.738	0
99	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM KALIMANTAN SELATAN	10.000.000	0	10.000.000	9.620.989	379.011	0
100	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM KALIMANTAN TIMUR	15.000.000	0	15.000.000	14.639.997	360.003	0
101	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM BANTEN	5.388.201	0	5.388.201	5.323.816	34.385	0
102	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM SULAWESI UTARA	10.000.000	0	10.000.000	9.467.455	532.545	0
103	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM SULAWESI TENGAH	5.063.532	0	5.063.532	4.694.597	368.935	0
104	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM SULAWESI SELATAN	5.146.892	0	5.146.892	5.062.711	84.181	0



(dalam ribu rupiah)

KODE BA	KODE UNIT	KEMENTERIAN/NEGARA/LEMBAGA DAN SATUAN KERJA	INSTANSI PUSAT/VERTIKAL	PEMBLOKIRAN ANGGARAN	PAGU SETELAH BLOKIR	LRKA-SF TA 2009	SISA TIDAK TEREALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
105	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM MALUKU	4.225.860	0	4.225.860	4.184.325	41.535
106	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM BALI	5.000.000	0	5.000.000	4.576.478	423.522
107	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM NTB	10.000.000	0	10.000.000	9.885.919	314.081
108	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM NTT	5.600.591	0	5.600.591	5.268.276	332.315
109	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM PAPUA	15.000.000	0	15.000.000	14.543.332	456.668
110	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM MALUKU UTARA	15.000.000	0	15.000.000	13.924.983	1.075.017
111	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM GORONTALO	8.000.000	0	8.000.000	7.657.194	342.806
112	05	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM IRIJA BARAT	2.436.900	0	2.436.900	2.425.960	10.940
113	06	BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI IV	405.550	0	405.550	295.800	149.750
114	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA MALUKU PROPINSI MALUKU UTARA	4.000.000	0	4.000.000	3.985.000	15.000
115	06	491812 DIREKTORAT RAWA DAN PANTAI	2.825.000	0	2.825.000	2.559.551	265.449
116	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA SUMATERA I PROPINSI NAD	22.000.000	2.890.807	19.109.193	21.674.539	-2.565.346
117	06	PELAKSANA PENGELOLAAN SDA SUMATERA II PROV. SUMUT	14.000.000	0	14.000.000	13.649.559	350.441
118	06	PELAKSANA PENGELOLAAN SDA SUMATERA VIII PROV. SUMATERA BARAT	7.250.000	0	7.250.000	7.056.248	193.752
119	06	PELAKSANA PENGELOLAAN SDA SUMATERA V PROV. SUMATERA SELATAN	43.875.000	0	43.875.000	42.331.512	1.543.488
120	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA MESUJI-SEKAMPUNG	12.000.000	0	12.000.000	11.654.847	345.153
121	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA CIDANAU-CILIJUNG-CIDURIAN	50.750.000	0	50.750.000	47.829.092	2.920.908
122	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA CILIWUNG-CISADANE	10.000.000	0	10.000.000	9.377.630	622.370
123	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA CITARUM	133.000.000	0	133.000.000	128.254.824	4.745.176
124	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA CITANDUY	23.750.000	0	23.750.000	23.150.000	600.000
125	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA CIMANUK-CISANGGARUNG	78.000.000	0	78.000.000	74.290.117	3.709.883
126	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA PEMALI-JUANA	158.000.000	44.359.199	113.640.801	154.235.328	-40.594.525
127	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA BENGAWAN SOLO	20.000.000	0	20.000.000	19.416.500	583.500
128	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA BENGAWAN SOLO	385.000.000	0	385.000.000	382.826.462	2.173.538
129	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA BRANTAS	129.750.000	37.922.167	91.827.833	117.236.208	-25.408.375
130	06	PELAKSANA PENGELOLAAN SDA KALIMANTAN I PROV. KALIMANTAN BARAT	14.200.000	0	14.200.000	13.122.973	1.077.027
131	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA KALIMANTAN II PROPINSI KALIMANTAN SELATAN	25.100.000	0	25.100.000	23.388.994	1.711.006
132	06	SNVT PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II SUB WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	17.500.000	0	17.500.000	17.006.049	493.951
133	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA KALIMANTAN III PROPINSI KALIMANTAN TIMUR	36.500.000	0	36.500.000	35.303.299	1.196.701
134	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA BALI-PENIDA PROPINSI BALI	16.450.000	0	16.450.000	15.568.849	881.151
135	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA NUSA TENGGARA I PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT	17.500.000	0	17.500.000	17.340.175	159.825
136	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA NUSA TENGGARA II PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR	10.000.000	0	10.000.000	9.430.352	569.648
137	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA SULAWESI III PROPINSI GORONTALO	31.500.000	0	31.500.000	31.208.480	291.520
138	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA SULAWESI III PROPINSI SULAWESI TENGAH	19.000.000	0	19.000.000	18.440.313	559.687
139	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA POMPENGAN-JENEBERANG PROPINSI SULAWESI SELATAN	102.200.000	0	102.200.000	99.166.694	3.033.306
140	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA SULAWESI IV PROPINSI SULAWESI TENGGARA	59.844.450	0	59.844.450	58.086.579	1.757.871
141	06	SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA POMPENGAN-JENEBERANG PROPINSI SULAWESI BARAT	56.600.000	0	56.600.000	54.020.945	2.579.055



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-9-

(dalam ribu rupiah)

KODE BA	KODE UNIT	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN SATUAN KERJA	INSTANSI PUSAT/VERTIKAL	PEMBLOKIRAN ANGGARAN	PAGU SETELAH BLOKIR	LRKA-SF TA 2009	SISA TIDAK TEREALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
142	06	498335 SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA MALUKU PROPINSI MALUKU	29.000.000	0	29.000.000	28.151.750	848.250
143	06	498350 SNVT PELAKSANA PENGELOLAAN SDA PROV. PAPUA BARAT	5.000.000	0	5.000.000	4.906.900	93.100
044		KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	4.500.000	0	4.500.000	3.156.647	1.343.353
1	01	622297 KANTOR MENTERI NEGARA KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	4.500.000	0	4.500.000	3.156.647	1.343.353
051		KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	400.000.000	0	400.000.000	388.040.383	1.959.617
1	01	452511 PENYEDIAAN PERUMAHAN	400.000.000	0	400.000.000	388.040.383	1.959.617
JUMLAH TOTAL			6.973.285.340	137.178.113	6.836.107.227	6.758.572.102	77.535.625

a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Anggaran,

Anny Ratnawati
NIP 196202241987032001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

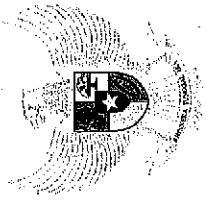
**II.A.2. RINCIAN ALOKASI SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL
YANG TIDAK SEPENUHNYA MELAKSANAKAN KEGIATAN STIMULUS FISKAL T.A. 2009
DENGAN ALASAN YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
DAN PEMOTONGAN/PENGURANGAN PAGU 2010**

(dalam ribu rupiah)

KODE BA	KODE UNIT	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN SATUAN KERJA	INSTANSI PUSAT/ VERTIKAL	PEMBLOKIRAN ANGGARAN	PAGU SETELAH BLOKIR	LRKA-SF TA 2009	SISA TIDAK TEREALISASI	PEMOTONGAN/ PENGURANGAN	ALASAN TIDAK TEREALISASI SEPENUHNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		82.256.000	9.168	82.246.832	70.488.968	11.757.864	11.757.862	Pembebasan tanah belum selesai, karena adanya protes masyarakat
1	04	498936 PEMBANGUNAN FASPEL LAUT, TG. BATU DAN PALAIHARI KALSEL	14.000.000	9.168	13.990.832	3.686.903	10.303.929	10.040.862	
2	08	445588 PEMBANGUNAN JALUR GANDA TEGAL - PEKALONGAN	68.256.000	0	68.256.000	66.802.065	1.453.935	1.110.000	Terdapat pengurangan nilai kontrak sebesar Rp 1,11 M pada beberapa paket karena belum adanya kesepakatan harga tanah dengan pemilik lahan. Pengurangan tidak mengganggu konstruksi utama hanya pada posisi konstruksi yang merupakan aksesoris dari konstruksi utama seperti tembok penahan.
JUMLAH TOTAL			82.256.000	9.168	82.246.832	70.488.968	11.757.864	11.150.862	

a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Anggaran,

Anny Rathawati
NIP 196202241987032001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**II.B.1. RINCIAN ALOKASI SATUAN KERJA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
YANG TIDAK SEPENUHNYA MELAKSANAKAN KEGIATAN STIMULUS FISKAL T.A. 2009
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN**

(dalam ribu rupiah)

KODE BA UNIT	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN SATUAN KERJA	DEKONSENTRASI	TUGAS PEMBANTUAN	JUMLAH	PEMBLOKIRAN ANGGARAN	PAGU SETELAH BLOKIR	LRKA-SF TA 2009	SISA TIDAK TEREALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	KEMENTERIAN PERTANIAN			35.000.000	53.000	34.937.000	34.930.638	406.302	
1	020007 DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.996.920	3.080	
2	170052 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0	5.000.000	5.000.000	63.000	4.937.000	4.859.633	77.367	
3	190016 DINAS PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	9.892.924	107.076	
4	200004 DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.976.812	23.188	
5	230018 DINAS PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	9.835.239	164.761	
6	240005 DINAS PETERNAKAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	
7	260005 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.974.170	25.830	
8	290006 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.995.000	5.000	
02	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11.062.535	122.285.455	228.949.360	0	228.949.360	196.929.589	22.019.671	
1	020835 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BEKASI	0	163.526	163.526	0	163.526	157.968	5.560	
2	020842 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KARAWANG	0	159.785	159.785	0	159.785	151.796	7.989	
3	021123 DISNAKER KAB. SUBANG	0	159.785	159.785	0	159.785	149.591	10.194	
4	021612 DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TASIKMALAYA	0	313.370	313.370	0	313.370	313.370	0	
5	021823 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUNINGAN	0	159.785	159.785	0	159.785	151.796	7.989	
6	025710 DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI	0	156.550	156.550	0	156.550	154.986	1.566	
7	030243 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KENDAL	0	159.435	159.435	0	159.435	159.435	0	
8	030612 KANTOR NAKERTRANS KABUPATEN BATANG	0	159.435	159.435	0	159.435	156.246	3.189	
9	030843 DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BREBES	0	178.235	178.235	0	178.235	154.708	23.527	
10	030942 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. PATI	0	159.435	159.435	0	159.435	151.463	7.972	
11	031309 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. REMBANG	0	159.435	159.435	0	159.435	0	159.435	
12	031432 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KABUPATEN BLORA	0	159.435	159.435	0	159.435	0	159.435	
13	031940 DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAGELANG	0	178.235	178.235	0	178.235	178.235	0	
14	032104 DINAS NAKERTRANS KAB. WONOSOBO	0	159.435	159.435	0	159.435	143.492	15.944	
15	032237 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KAB. PURWOREJO	0	159.435	159.435	0	159.435	159.280	175	
16	035138 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG	0	159.435	159.435	0	159.435	159.435	0	
17	035641 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SURAKARTA	0	159.435	159.435	0	159.435	0	159.435	
18	051846 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TULUNGAGUNG	0	159.435	159.435	0	159.435	159.285	150	
19	055304 DINAS TENAGA KERJA KOTA MALANG	0	159.435	159.435	0	159.435	157.841	1.594	
20	065618 DINAS TENAGA KERJA KOTA BLITAR	0	159.435	159.435	0	159.435	154.652	4.783	
21	060325 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KAB. ACEH UTARA	0	174.060	174.060	0	174.060	172.210	1.850	
22	065107 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BANDA ACEH	0	174.060	174.060	0	174.060	174.060	0	
23	070153 DINAS KEPENDUDUKAN, NAKER DAN SOSIAL KAB. DELI SERDANG	0	170.860	170.860	0	170.860	157.191	13.669	
24	070415 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TAPANULI TENGAH	0	275.637	275.637	0	275.637	275.637	0	